



JENEPONTO

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

ILPPD Tahun 2020



Bupati Kabupaten

Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Jeneponto



Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2020

I. PENDAHULUAN

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2020 disusun sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Jeneponto Tahun 2020 mencakup urusan desentralisasi, urusan tugas pembantuan, dan tugas umum pemerintahan. Dari Penyelenggaraan urusan tersebut, dapat dilihat dari capaian program dan kegiatan serta permasalahan dan pemecahan masalahnya. Permasalahan yang dihadapi dan hal-hal yang tidak tercapai dalam pelaksanaan program/kegiatan Tahun Anggaran 2020 menjadi masukan bagi penyelenggaraan pemerintahan tahun selanjutnya.

a. Data Geografi

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Jeneponto, Kabupaten Jeneponto terletak antara $5^{\circ} 23'12''$ - $5^{\circ} 42'1,2''$ Lintang Selatan dan $119^{\circ} 29'12''$ - $119^{\circ} 56' 44,9'$ Bujur Timur dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar
- Sebelah Timur : Kabupaten Bantaeng
- Sebelah Selatan : Laut Flores
- Sebelah Barat : Kabupaten Takalar

Kabupaten Jeneponto memiliki wilayah seluas 749,79 Km². Luas wilayah Kabupaten Jeneponto tersebut hanya kurang lebih 1,20 persen dari luas wilayah administrasi Propinsi Sulawesi Selatan.

b. Kondisi Ekonomi

➤ Potensi Unggulan Daerah

a. Pertanian

Kabupaten Jeneponto merupakan salah satu Kabupaten di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki potensi sumber daya alam sangat beraneka-ragam dan tersebar di seluruh kecamatan, terutama di sektor pertanian. Bidang pertanian unggulan meliputi tanaman pangan, sayur-sayuran, hortikultura, dan perkebunan. Unggulan tanaman pangan di wilayah Kabupaten Jeneponto lebih didominasi oleh komoditi padi, jagung, ketela pohon, ubi jalar, dan kacang-kacangan. Untuk komoditi sayur-sayuran, daerah yang potensial adalah Wilayah utara yaitu Kecamatan Rumbia dan Kecamatan Kelara di mana komoditi sayuran khususnya wortel, cabai besar, kol, sawi, kentang, dan bawang merah di wilayah ini pemasarannya telah menembus pulau-pulau besar seperti kalimantan. Sentra komoditas cabe besar ada di Kecamatan Rumbia, dan Kecamatan Kelara bagian Utara. Hortikultura unggulan yang memiliki ciri khas Kabupaten Jeneponto adalah alpukat di Kecamatan Rumbia dan Kelara bagian utara, dan pisang di seluruh kecamatan. Sedangkan perkebunan unggulan yang

cukup tinggi produksinya terdapat di Wilayah Kecamatan Rumbia dan Kelara berupa cengkeh, kopi. Dari komoditi-komoditi unggulan tersebut memungkinkan adanya peluang pengembangan industri pengolahan.

b. Peternakan

Potensi peternakan di wilayah Kabupaten Jeneponto meliputi ternak besar dan ternak kecil. Produk unggulan peternakan di Kabupaten Jeneponto antara lain kuda, sapi, kambing terutama Kambing PE (Peranakan Etawa), ayam ras (petelur dan pedaging), produksi ayam ras (potong/petelur) hampir menyeluruh di daerah Jeneponto.

c. Perikanan

Potensi perikanan di Kabupaten Jeneponto meliputi perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Pengembangan budidaya air payau pada tambak-tambak yang berada di kawasan pesisir dengan komoditas utama ikan bandeng dan udang. Potensi perikanan tangkap didukung dengan adanya 5 (Lima) kecamatan pesisir di wilayah Kabupaten Jeneponto yaitu Kecamatan Bangkala, Bangkala Barat, Tamalatea, Binamu, Arungkeke, dan Tarowang beserta aktivitas nelayan yang ada pada masing-

masing wilayah tersebut. Pantai Pabiringa yang berada di Kecamatan Binamu menjadi pusat aktivitas nelayan dan perikanan tangkap di Kabupaten Jeneponto didukung dengan adanya Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dan pasar ikan di kawasan tersebut. Produk unggulan dari perikanan tangkap laut adalah ikan tuna, tongkol, dan cakalang. Pengembangan potensi perikanan di Kabupaten Jeneponto dapat dilakukan dengan sistem pengembangan kawasan baik kawasan perikanan budidaya maupun kawasan pesisir untuk dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Kawasan perikanan budidaya merupakan suatu wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budidaya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana dan sarana umum yang ada. Dengan pembangunan kawasan tersebut, diharapkan produksi perikanan terus meningkat dan pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

d. Pariwisata

Kabupaten Jeneponto memiliki geomorfologis yang terdiri dari wilayah pegunungan dan dataran serta perairan pantai, sehingga membentuk bentangan-bentangan alam yang indah dengan patahan-patahan yang menyebabkan terjadinya air terjun. Selain itu Kabupaten Jeneponto juga kaya akan

peninggalan sejarah dengan ditunjang program-program unggulan seperti pertanian, peternakan, perikanan, serta pengembangan potensi Desa wisata sebagai upaya untuk membuka dan memaksimalkan sektor pariwisata dalam rangka meningkatkan kunjungan wisatawan domestik.

Pengembangan pariwisata dapat ditempuh melalui pengadaan paket wisata, pengembangan jalur wisata, pengadaan sarana dan prasarana penunjang seperti hotel dan penginapan, serta meningkatkan aksesibilitas dengan meningkatkan kondisi jalan dan menyediakan sarana transportasi menuju obyek wisata juga peningkatan sumber daya manusia yang lebih baik.

Jumlah Sarana Wisata Kabupaten Jeneponto Tahun 2020

No	Sarana Akomodasi	Jumlah Kamar
1	Hotel Bintang Karaeng	10
2	Hotel Sari	30
3	Hotel Valentine	13
4	Hotel Pelangi	10
5	Hotel Farhan	18
6	Wisma Cendana	18
7	Penginapan Putri Solo	12
8	Penginapan Boyong	18
9	Villa LHR	5
10	Wisma Nabacu I	5
11	Wisma Nabacu II	8
12	Wisma Jaya	11
13	Hotel Kita	40
14	Hotel Linkarsut	30
15	Hotel Binamu	16
16	Hotel Pelita	10
17	Hotel Dalle	8

II. Capaian Kinerja Makro

Adapun pencapaian Indikator Kinerja Makro Kabupaten Jeneponto Pada Tahun 2020 sebagai berikut :

a. Indeks Pembangunan Manusia

Peningkatan IPM Kabupaten Jeneponto Pada tahun 2019, capaian IPM sebesar 64 dan pada tahun 2020 adalah sebesar 64,26.

b. Penduduk Miskin

Dari jumlah dan prosentase penduduk miskin Kabupaten Jeneponto mengalami penurunan sebesar -107,29 %. Dimana pada tahun 2019 presentase penduduk miskin adalah 54,05 %, Sedangkan pada tahun 2020 adalah 53,24 %.

c. Angka Pengangguran

Pada Tahun 2019, di Kabupaten Jeneponto berdasarkan Jeneponto Dalam Angka oleh BPS diperoleh angka 2,12 %. Sedangkan berdasarkan hitungan pada Tahun 2020 Kabupaten Jeneponto bertambah diangka 2,31 %. Hal ini disebabkan banyaknya sektor usaha yang tutup akibat efek Pandemi Covid-19 terhadap sektor dunia usaha.

d. Pertumbuhan Ekonomi

Pada Tahun 2019 BPS Kabupaten Jeneponto terhitung pada angka 5,47 %, dan pada Tahun 2020 mengalami kembali perlambatan pertumbuhan dengan angka 0,16%. Hal ini terjadi diakibatkan dari adanya Pandemi Covid-19 yang memukul banyak sektor usaha sehingga laju pertumbuhan ekonomi menjadi negatif.

e. Pendapatan Perkapita

Pada Tahun 2019 diperoleh Pendapatan Perkapita untuk Kabupaten Jeneponto sebesar 27,74 juta rupiah. Sedangkan pada Tahun 2020 Pendapatan Perkapita ADHB mengalami kenaikan tipis menjadi sebesar 28,14 juta rupiah. Rendahnya kenaikan pendapatan per kapita pada Tahun 2020 didominasi oleh multiple efek dari pandemi Covid-19

f. Ketimpangan Pendapatan (Indeks Gini)

Pada Tahun 2019 didapatkan Indeks Gini Kabupaten Jeneponto 0,000122 artinya terjadi penurunan ketimpangan pendapatan sebesar 0,013114. Karena Indeks gini Kabupaten Jeneponto pada Tahun 2020 diperkirakan akan menjadi 0,012993.

III. Ringkasan Capaian Kinerja Urusan Pelayanan Dasar

a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Untuk Indikator Kinerja Kunci Hasil yakni sebagai berikut :

- 1) Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD dengan Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD sebanyak 12.663 sedangkan Jumlah anak usia 5-6 tahun pada Kabupaten Jeneponto sebanyak 19723 atau capaian prentase kinerja sekitar 64,20% ;
- 2) Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar dengan Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD sebanyak 12.663 sedangkan

- Jumlah anak usia 5-6 tahun pada Kabupaten Jeneponto sebanyak 19723, dengan capaian presentase kinerja sekitar 92,50% ;
- 3) Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama dengan Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama sebanyak 21.347, sedangkan Jumlah anak usia 13-15 tahun pada Kabupaten Jeneponto sebanyak 20.425, atau dengan capaian presentase kinerja sekitar 104,51% ;
 - 4) Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang
berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan dengan Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan sebanyak 53568, sedangkan Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada Kabupaten Jeneponto sebanyak 61.157, atau dengan capaian presentase kinerja sekitar 87,59 % ;
 - 5) Terlestarikannya Cagar Budaya dengan Jumlah cagar budaya yang dilestarikan di Kabupaten Jeneponto sebanyak 6, sedangkan Jumlah cagar budaya di Kabupaten Jeneponto yang terdata sebanyak 6, atau dengan capaian presentase kinerja sekitar 100 %.

b. Dinas Kesehatan

Untuk Indikator Kinerja Kunci Hasil yakni sebagai berikut :

- 1) Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk dengan Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan sebanyak 239, sedangkan Jumlah Penduduk di kabupaten Jeneponto sbanyak 401.610, atau dengan capaian presentase kinerja sekitar 0,059511 % ;
- 2) Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi tidak ada, sedangkan Jumlah RS di kabupaten Jeneponto sebanyak 1, atau dengan capaian presentase kinerja sekitar 0% ;
- 3) Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil dengan Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sebanyak 7.251, sedangkan Jumlah ibu hamil di kabupaten Jeneponto sebanyak 7.845, atau dengan capaian presentase kinerja sekitar 92,42 % ;
- 4) Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan dengan Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sebanyak 6.822, sedangkan Jumlah ibu bersalin di kabupaten Jeneponto sebanyak 7.251, atau dengan capaian presentase kinerja sekitar 94,08 % ;
- 5) Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir dengan Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar sebanyak 6.051, sedangkan Jumlah bayi baru

- lahir di kabupaten Jeneponto sebanyak 6.778, atau dengan capaian presentase kinerja sekitar 89,27% ;
- 6) Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar dengan Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = 24949. Jumlah balita di kabupaten/kota = 33441, atau dengan capaian presentase kinerja sekitar 74,60 % ;
 - 7) Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dengan Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar sebanyak 9.573, sedangkan Jumlah anak usia pendidikan dasar di kabupaten Jeneponto sebanyak 12.830, atau dengan capaian presentase kinerja sekitar 74,61 % ;
 - 8) Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar dengan Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar sebanyak 129.691, sedangkan Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten Jeneponto sebanyak 216.687, atau dengan capaian presentase kinerja sekitar 59,85 % ;
 - 9) Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar dengan Jumlah warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar sebanyak 19.315, sedangkan Jumlah orang warga negara usia 60 tahun di kabupaten Jeneponto sebanyak 52.540, atau dengan capaian presentase kinerja sekitar 36,76 % ;

- 10) Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dengan Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebanyak 41.473. Jumlah penderita hipertensi di kabupaten Jeneponto sebanyak 62.621, atau dengan capaian presentase kinerja sekitar 66,22 % ;
- 11) Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dengan Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebanyak 3.550, sedangkan Jumlah penderita DM di kabupaten Jeneponto sebanyak 5.133, atau dengan capaian presentase kinerja sekitar 69,16 % ;
- 12) Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dengan Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebanyak 316, sedangkan Jumlah penderita ODGJ di kabupaten Jeneponto sebanyak 841, atau dengan capaian presentase kinerja sekitar 37,57 % ;
- 13) Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar dengan Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebanyak 443, sedangkan Jumlah penderita TBC di kabupaten Jeneponto sebanyak 927, atau dengan capaian presentase kinerja sekitar 47,78 % ;
- 14) Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar dengan Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar sebanyak 10.617, sedangkan Jumlah orang dengan resiko

terinfeksi HIV di kabupaten Jeneponto sebanyak 19.739, atau dengan capaian presentase kinerja sekitar 53,78 % ;

c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Untuk Indikator Kinerja Kunci Hasil yakni sebagai berikut :

- 1) Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota dengan Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha) seluas 63.058, sedangkan Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha) seluas 324.3474 Ha, atau dengan capaian presentase kinerja sekitar 1,94 % ;
- 2) Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota dengan Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota (m) = 82. Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan kabupaten/kota (m) = 596, atau dengan capaian presentase kinerja sekitar 13,75 % ;
- 3) Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi dengan Luas irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan dan pelihara (ha) di tahun eksisting seluas

- 14.573, sedangkan luas daerah irigasi kewenangan kabupaten Jeneponto seluas 22.779, atau dengan capaian presentase kinerja sekitar 63,97 % ;
- 4) Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten Jeneponto dengan Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten Jeneponto sebanyak 68.317, sedangkan Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten Jeneponto sebanyak 81.431, atau dengan capaian presentase kinerja sekitar 83,89 % ;
 - 5) Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik dengan Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD sebanyak 9.430, sedangkan Jumlah rumah di Kabupaten Jeneponto sebanyak 83.292, atau dengan capaian presentase kinerja sekitar 11,32 % ;
 - 6) Rasio kepatuhan IMB Kabupaten Jeneponto dengan Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya sebanyak 333, sedangkan Jumlah IMB yang berlaku sebanyak 333, atau dengan capaian presentase kinerja 100 % ;

- 7) Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten Jeneponto dengan Jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap sebanyak 471,7 sedangkan Jumlah total panjang jalan Kabupaten Jeneponto sebanyak 855,14 atau dengan capaian presentase kinerja sekitar 55,16 % ;
- 8) Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi dengan Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabu/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis sebanyak 204, sedangkan Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah Kabupaten Jeneponto sebanyak 204, atau dengan capaian presentase kinerja 100 %.

d. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan

Untuk Indikator Kinerja Kunci Hasil yakni sebagai berikut :

- 1) Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota dengan Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n sebanyak 7, sedangkan Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n sebanyak 7, atau dengan capaian presentase kinerja sekitar 100 % ;
- 2) Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota dengan Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni pada

- Tahun 2020 datanya tidak ada disebabkan kegiatan tersebut belum dilaksanakan sehingga tidak tertuang dalam DPA ;
- 3) Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani dengan Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha) pada Tahun 2020 datanya tidak ada disebabkan kegiatan tersebut belum dilaksanakan sehingga tidak tertuang dalam DPA ;
 - 4) Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) dengan Jumlah unit rumah tidak layak huni, pada Tahun 2020 datanya tidak ada disebabkan kegiatan tersebut belum dilaksanakan sehingga tidak tertuang dalam DPA ;
 - 5) Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) dengan Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU, pada Tahun 2020 datanya tidak ada disebabkan kegiatan tersebut belum dilaksanakan sehingga tidak tertuang dalam DPA ;
 - 6) Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum dengan Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum, pada Tahun 2020 datanya tidak ada disebabkan kegiatan tersebut belum dilaksanakan sehingga tidak tertuang dalam DPA ;
 - 7) Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal dengan Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas izin lokasi, pada Tahun 2020 datanya tidak ada

- disebabkan kegiatan tersebut belum dilaksanakan sehingga tidak tertuang dalam DPA ;
- 8) Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dengan Jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0.5 ha, pada Tahun 2020 datanya tidak ada disebabkan kegiatan tersebut belum dilaksanakan sehingga tidak tertuang dalam DPA ;
 - 9) Tersedianya tanah untuk masyarakat dengan Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan Izin Membuka Tanah dengan Luas Izin Membuka Tanah yang diterbitkan sebanyak 67751;
 - 10) Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi dengan Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani sebanyak 5, sedangkan Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan sebanyak 5, atau dengan capaian presentase kinerja 100 %.

e. Dinas Sosial

Untuk Indikator Kinerja Kunci Hasil yakni sebagai berikut :

- 1) Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM) dengan Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sebanyak 5500. Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia

terlantar dan gelandangan pengemis sebanyak 27859, atau dengan capaian presentase kinerja 19,74 % ;

- 2) Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten Jeneponto dengan Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran sebanyak 74, sedangkan Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota sebanyak 74, atau dengan capaian presentase kinerja 100 %.

f. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Untuk Indikator Kinerja Kunci Hasil yakni sebagai berikut :

- 1) Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan dengan Jumlah pengaduan yang ditangani tidak ada data, sedangkan Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk juga tidak ada data ;
- 2) Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan dengan Jumlah Perda / Perkadayang memuat sanksi yang ditegakkan sebanyak 4, sedangkan Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuatsanksi sebanyak 4, atau dengan capaian presentase kinerja 100 % ;
- 3) Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sebanyak 67.751 ;

- 4) Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dengan Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana untuk tahun 2020 tidak ada data ;
- 5) Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dengan Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Jumlah satu dokumen RPB lengkap dan sudah disahkan, untuk Tahun 2020 tidak ada data ;
- 6) Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dengan Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah ditambah jumlah layanan pemadaman di Kabupaten sebanyak 44, sedangkan Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten Jeneponto sebanyak 80, atau capaian kinerja sekitar 55 % ;
- 7) Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran dengan Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran sebanyak 20 s/d 30 Menit.

IV. Hasil EPPD dan Opini atas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Tahun Sebelumnya

a. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama 2 Tahun terakhir didapatkan hasil sebagai berikut:

Uraian	Skor Kinerja Tingkat Nasional	Kategori Kinerja Tingkat Nasional	Peringkat Provinsi
EPPD Tahun 2020 terhadap LPPD Tahun 2019	3.0646	Tinggi	22
EPPD Tahun 2021 terhadap LPPD Tahun 2020	Masih dalam tahap evaluasi	Masih dalam tahap evaluasi	Masih dalam tahap evaluasi

b. Opini Laporan Keuangan Daerah

Uraian	Opini Laporan Keuangan Daerah
Opini BPK atas LDK Tahun 2019	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
Opini BPK atas LDK Tahun 2020	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

V. Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran Daerah

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	6
4	PENDAPATAN DAERAH	1.413.643.598.368,00	1.336.612.121.405,05	94,55
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	144.710.855.611,00	101.082.519.819,40	69,85
4 1 1	Hasil Pajak Daerah	18.389.798.966,00	16.831.768.306,00	91,53
4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	87.398.874.473,00	50.324.613.164,40	57,58
4 1 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.443.638.036,00	4.687.431.104,00	86,11
4 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	33.478.544.136,00	29.238.707.245,00	87,34
4 2	DANA PERIMBANGAN	1.048.230.496.825,00	1.024.516.003.786,00	97,74



4	2	1		Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	20.162.260.000,00	14.860.735.078,00	73,71
4	2	2		Dana Alokasi Umum	674.702.522.000,00	674.702.522.000,00	100,00
4	2	3		Dana Alokasi Khusus	353.365.714.825,00	334.952.746.708,00	94,79
4	3			LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	220.702.245.932,00	211.013.597.799,65	95,61
4	3	1		Pendapatan Hibah	49.500.000.000,00	27.532.215.614,00	55,62
4	3	3		Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan	39.363.095.932,00	49.166.331.915,65	124,90
				Pemerintah Daerah lainnya			
4	3	4		Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	106.818.350.000,00	106.818.350.000,00	100,00
4	3	5		Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	25.020.800.000,00	27.496.700.270,00	109,90
5				BELANJA DAERAH	1.460.676.304.187,00	1.349.892.421.763,47	92,42
5	1			BELANJA TIDAK LANGSUNG	737.175.032.399,00	704.018.731.609,00	95,50
5	1	1		BELANJA PEGAWAI	540.812.747.307,00	514.098.694.043,00	95,06
5	1	4		BELANJA HIBAH	9.779.882.000,00	9.454.882.000,00	96,68
5	1	5		BELANJA BANTUAN SOSIAL	3.100.000.000,00	2.800.000.000,00	90,32
5	1	6		BELANJA BAGI HASIL KEPADA	4.484.070.000,00	0,00	0,00
5	1	7		BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA, PEMERINTAHAN DESA DAN PARTAI POLITIK	177.337.156.598,00	177.319.355.566,00	99,99
5	1	8		BELANJA TIDAK TERDUGA	1.661.176.494,00	345.800.000,00	20,82
5	2			BELANJA LANGSUNG	723.501.271.788,00	645.873.690.154,47	89,27
5	2	1		BELANJA PEGAWAI	7.027.110.000,00	6.742.974.900,00	95,96
5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	399.824.007.289,00	349.250.502.786,00	87,35
5	2	3		BELANJA MODAL	316.650.154.499,00	289.880.212.468,47	91,55
6				SURPLUS/(DEFISIT) PEMBIAYAAN DAERAH	(47.032.705.819,00)	(13.280.300.358,42)	28,24
6	1			Penerimaan Pembiayaan Daerah	48.532.705.819,00	48.459.464.818,90	99,85
6	2			Pengeluaran Pembiayaan Daerah	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100,00
				PEMBIAYAAN NETTO	47.032.705.819,00	46.959.464.818,90	99,84
				SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0,00	33.679.164.460,48	100,00

VI. Inovasi Daerah

Dalam menyelenggarakan pemerintahan, Kabupaten Jeneponto selama Tahun 2020 telah melakukan berbagai inovasi dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Inovasi tersebut ialah sebagai berikut :



No	Judul Inovasi	Bentuk Inovasi	Urusan Pemerintah	Tanggal Penerapan
1	TA'MURI (TERTATA MUDAH DAN RINGKAS)	Inovasi pelayanan publik	administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	01-07-2019
2	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO TURATEA PEMDA JENEPONTO	Inovasi pelayanan publik	komunikasi dan informatika	02-01-2019
3	Support sistem kegiatan Dishub berbasis online (Transportation Smart)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	perhubungan	08-09-2020
4	Festival Fotografi dan Animasi Destinasi Wisata Kab. Jeneponto	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	pariwisata	02-12-2019
5	Penggunaan Pelampung Ramah Lingkungan (eco float) dalam Budidaya Rumput laut	Inovasi pelayanan publik	kelautan dan perikanan	18-11-2019
6	SMART ID CARD Anggota Dinas Perhubungan Kabupaten Jeneponto	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	perhubungan	11-11-2019
7	SIPEKERJA	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Kepegawaian	01-03-2019
8	Razia Anak Sekolah Sistem Tiga Pilar Trantibum (Satpol PP, Polri dan TNI)	Inovasi pelayanan publik	ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	02-09-2019

9	Mitra Trantibumlinmas	Inovasi pelayanan publik	ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	06-01-2019
10	GERAKAN TANGGAP LANSIA (GANTALA)	Inovasi pelayanan publik	kesehatan	07-01-2019
11	Sistem Informasi Pengelolaan Administrasi Perkantoran Berbasis Jaringan Online (SIPAKABAJI)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	18-12-2020
12	Sistem Digitalisasi Layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (SiDILAN-PPID) Pemkab Jeneponto	Inovasi pelayanan publik	komunikasi dan informatika	23-12-2019

VII. Penutup

Penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Jeneponto Tahun 2020 telah selesai dilaksanakan dengan berbagai macam penyesuaian untuk menghadapi pandemi dan adaptasi kebiasaan baru. Mencermati penyelenggaraan pemerintahan yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan untuk mengakselerasi pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Jeneponto. Setidaknya, terdapat 5 (lima) hal yang perlu dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Jeneponto selanjutnya, yaitu:

1. Penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) merupakan salah satu tantangan baru bagi Kabupaten Jeneponto dalam menjalankan seluruh

sendi kehidupan bermasyarakat. Seluruh penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Jeneponto harus disesuaikan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengedepankan keselamatan masyarakat di tengah Pandemi Covid-19 yang masih belum berakhir. Penataan ulang program, kegiatan maupun target kinerja merupakan suatu keharusan untuk menyelaraskan dengan kondisi faktual dilapangan. Oleh karena itu perubahan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Jeneponto merupakan hal awal dan mendasar yang perlu untuk segera dilakukan.

2. Standar Pelayanan Minimal merupakan kewajiban pemerintah disetiap tingkatan pemerintahan untuk memenuhi hak warga negara. Dengan dilakukannya refocusing anggaran tentunya akan mengubah target pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang telah direncanakan. Namun penerapan Standar Pelayanan Minimal tersebut tetap harus menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Jeneponto untuk dilaksanakan.
3. Pemulihan Ekonomi Nasional yang merupakan salah satu prioritas pemerintah dalam menanggulangi lumpuhnya aktivitas masyarakat sebagai dampak Pandemi Covid-19 harus pula menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Jeneponto. Pemberdayaan masyarakat melalui usaha mikro dan kecil, pemberian bantuan sosial diharapkan dapat menjadi trigger untuk menggerakkan kembali roda perekonomian masyarakat. Dengan kembali pulihnya perekonomian masyarakat diharapkan gejolak maupun konflik sosial akibat dari tingginya angka kemiskinan, jumlah pengangguran maupun tingkat kriminalitas yang kita khawatirkan dapat diminimalisir.

4. Penyelenggaraan pemerintahan membutuhkan sumber dana yang hendaknya lebih banyak dipenuhi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena kemampuan pendanaan dari Pemerintah Pusat sesungguhnya terbatas. Namun ditengah Pandemi Covid-19 yang terjadi, sumber-sumber pendapatan Pemerintah Daerah semakin berkurang..
5. Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan salah satu tugas Pemerintah. Keberadaan Standart Operating Procedure dalam memberikan pelayanan publik merupakan suatu keharusan. SOP pelayanan publik saat ini harus kembali disesuaikan dengan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan seluruh masyarakat. Pemerintah Kabupaten Jeneponto dituntut untuk melakukan perubahan pelayanan public dari pelayanan manual menjadi pelayanan berbasis teknologi informasi yang merupakan suatu keharusan saat ini.

Berbagai upaya dan terobosan yang progresif, dalam penyelenggaraan pemerintahan akan terus kami lakukan secara maksimal ditengah pandemic covid-19. Selain hal tersebut, kerjasama yang baik antara pemerintah Kabupaten Jeneponto dengan seluruh stakeholders akan mendukung pencapaian kinerja dan ekspektasi masyarakat. Upaya-upaya tersebut akan selalu kami prioritaskan untuk mengakselerasi pencapaian visi dan misi serta penyelesaian agenda pembangunan di Kabupaten Jeneponto.



Demikian ringkasan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jeneponto selama Tahun 2020. Beberapa capaian kinerja disadari masih belum sepenuhnya mencapai target kinerja pemerintah Kabupaten Jeneponto yang telah ditetapkan. Hal ini akan menjadi catatan dan perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan selanjutnya agar fungsi dan tugas pemerintah dalam kehidupan dan bernegara di Kabupaten Jeneponto dapat terlaksana dengan lebih baik lagi.

BUPATI JENEPONTO

Drs. H. IKHSAN ISKANDAR, M.Si